

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Peringkat Provinsi Dalam Pengembangan Ekspor (Metode *Regional Export Performance Index / REPI*)
Fahrudin Ramly

Determinant of Economic Growth in Maluku Province, periods 1986-2009 : Error Correction Approach
Yerimias Manuhutu

Pengaruh *Locus of Control* terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit dengan Kinerja Auditor sebagai Variabel Mediasi
Maria Hehanusa

Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku
Tedy Christianto Leasiwal

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Jeanee B. Nikijuluw

Anomali Hubungan antara Angkatan Kerja dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Jefry Gasperz

Tinjauan Makro Keuangan Indonesia, periode 1998-2008
Desry Jonelda Louhenapessy

Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Skeptisisme Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Survey Persepsi Auditor Inspektorat Kota Ambon)
Ali Amin Kalau

Alternatif Pengendalian Inflasi Melalui Nilai Nilai Kearifan Lokal Maluku
Maryam Sangadji

Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
Ventje Jeffry Kuhuparuw

Pengaruh Dimensi Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Perilaku Produktif Karyawan
Zainuddin Latuconsina
John H. K. Wattimena

Analisa Produksi Pala di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah
Sherly Ferdinandus

CE	Vol. VII	No. 2	Halaman 196 - 303	Ambon Desember 2013	ISSN 1978-3612
----	----------	-------	----------------------	------------------------	-------------------

**PENGARUH BANTUAN PEMBERDAYAAN TERHADAP
PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN SERAM BARAT
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Ventje Jeffry Kuhuparuw
Politeknik Negeri Ambon

Abstrac

This study aims to determine the effect on income support empowerment of coastal communities. This study uses primary and secondary data obtained from the Dinas Pendapatan dan Perikanan kabupaten Seram Bagian Barat.

Then analyzed using quantitative analysis method, namely the simple linear regression method. The results showed that a very empowering to earnings are significantly affected coastal society at the 95% confidence level using a simple linear regression equation was obtained: $Y = 1.3 + 16.695x$

For the effect on income support empowerment of coastal communities in kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat shows that if the influence of the variable X to variable Y is 85.2% and the remaining 4.8% were determined by other variables that can't be identified in the analysis model. From the results of these calculations have proved that help empower considerable influence for public revenue

Keywords: Empowerment, Community Income

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi adalah salah satu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu negara atau daerah dapat ditingkatkan dalam waktu yang panjang. Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha merupakan upaya pemerintah yang dapat menimbulkan suatu perbaikan alam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu melihat biaya pembangunan ekonomi suatu negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat maka, pendapatan nasional dapat digunakan sebagai permintaan atau indikator keuangan ekonomi. Selain itu juga sangat diharapkan proses pembangunan yang senantiasa dicampurkan oleh pemerintah dapat mengatasi tingkat kemiskinan.

Suatu daerah di mana untuk mengatasi tingkat kemiskinan tidaklah semudah dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan tingkat kemiskinan di kemukakan oleh Babwin dan Meiler kemiskinaan memiliki enam sifat ekonomi yang terdapat di negara-negara miskin atau negara sedang berkembang yaitu :

- a. Negara tersebut merupakan produsen barang-barang primer
- b. Menghadapi masalah penduduk
 - a. Negara tersebut merupakan produsen barang-barang primer
 - b. Menghadapi masalah penduduk
 - c. Sumber-sumber alam belum banyak dikelola
 - d. Penduk masih terbelakang
 - e. Kurangnya kapital

Sejalan dengan hal tersebut diatas menurut Michael P. Todaro (2000 : 522) tentang partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan berdasarkan pengalaman sejumlah instansi pembangunan menunjukkan bahwa hanya usaha-usaha yang sepenuhnya mengarah kepada kepentingan masyarakat sajalah yang akan mencapai sasaran dengan biaya yang minimal, selain itu menurut Loekmen Sutrisno (1995 : 243) untuk menciptakan kemandirian dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi peran pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah yang selama ini bersifat dominan, regulator dan koortalif menjadi fasilitator yang berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan menentukan arah kebijakan pembangunan saja.

Dari uraian diatas maka pembangunan ekonomi dapat tercipta kemajuan yang antara lain dipengaruhi oleh peran sumber daya manusia, teknologi, sehingga pada akhirnya dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sejalan dengan itu tercipta pula pemerataan pendapatan yang semakin adil dan merata.

Dengan demikian diharapkan adanya partisipasi masyarakat memberi manfaat antara lain :

Pertama : Dapat diidentifikasi segala potensi sumber daya dan kemampuan yang ada di dalam masyarakat maupun pemerintah setempat sehingga pada saat penggunaan program atau kebijaksanaan akan lebih realitis, efisien, dan efektif di dalam pemanfaatan sumber daya, serta berdasarkan kepada prioritas kebutuhan yang sebenarnya.

Kedua : Mampu menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lingkungan (Willingness) untuk ikut dalam merencanakan, membangun, memanfaatkan, sekaligus memelihara hasil-hasil pembangunan yang ada secara berkelanjutan.

Kondisi masyarakat di Desa-desa Kecamatan Seram Barat sangat membutuhkan tangan pemerintah dalam mengelola dan dalam mensejahterakan kehidupan keluarga mereka. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah berdasarkan konsep pembangunan masyarakat pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani yang tinggal dikawasan pesisir pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- Tersedianya prasarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga mahal dan kualitasnya baik.
- Meningkatnya peran lembaga masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
- Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar.

- Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

Jumlah Desa Pesisir yang ada di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat berjumlah 19 desa antara lain adalah : Kairatu, Hatusua, waesela, Dokiar, Kaibobo, Piru, Talaga, Kawa, Pelita jaya, Pulau Osi, Ariate, Wael, Masika Jaya, Lokki, katapang, Luhu, Iha, Kulur, Taniwel.

Desa Pesisir yang dapat bantuan pemberdayaan yang tidak mendapat pemberdayaan antara lain: Kairatu (dapat bantuan), Hatusua (dapat bantuan), waesela (tidak dapat bantuan), Dokiar (dapat bantuan), Kaibobo (dapat bantuan), Piru (tidak dapat bantuan), Talaga (dapat bantuan), Kawa (dapat bantuan), Pelita jaya (dapat bantuan), Pulau Osi (dapat bantuan), Ariate (dapat bantuan), Wael (dapat bantuan), Masika Jaya (dapat bantuan), Lokki (dapat bantuan), katapang (dapat bantuan), Luhu (dapat bantuan), Iha (dapat bantuan), Kulur (dapat bantuan), Taniwel (dapat bantuan), data tersebut bersumber pada Dinas Perikanan Seram Bagian Barat.

Selain dari itu masih terdapat beberapa desa yang belum mendapat bantuan pemberdayaan dari pemerintah, karena dilihat Kabupaten Seram Bagian Barat masih dalam proses pembangunan menuju masyarakat yang prasejahtera.

Paradigma-paradigma kebijakan pembangunan sering terjadi pada proyek pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Seram Barat, namun terlebih dahulu perlu diamati pola mata pencaharian penduduk setempat dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kab Seram Bagian Barat Menurut Status Penduduk

Status	Jumlah KK	%
Nelayan	7.358	86,5
Petani	789	8,3
Pegawai	356	5,2

Sumber : Kecamatan Seram Barat

Dari data tersebut diatas dapat dilihat mata pencaharian dimana penduduk Kecamatan Seram Barat masing-masing

nelayan sebanyak 7358 KK atau sebesar 86,5%, petani sebanyak 789 KK atau sebesar 8,3% selanjutnya pegawai 356 KK atau sebesar 5,2%.

Diamati dari mata pencaharian penduduk ternyata sebagian besar nelayan, hal ini tentunya potensi sumber daya alam kelautan cukup berpotensi namun kalau ditinjau sarana dan prasarana perikanan sangat terbatas setelah pemakaran Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), proyek-proyek pemberdayaan masyarakat pesisir mulai diperhatikan dan dampaknya bagi pendapat masyarakat.

Adapun kelompok yang telah membentuk dan mendapatkan bantuan sebanyak 390 kelompok dan masing-masing kelompok memperkerjakan 2–5 orang, adapun alat yang berupa alat penangkapan ikan yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2.

Jumlah Bantuan Alat Penangkapan
Di Kecamatan Seram Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat

Jenis Alat Tangkap	Jumah KK	%
o Pukat Pantai	29	1,4
o Pukat Cincin	44	4
o Jaring Insang Hanyut	251	22,8
o Jaring Insang Lingkar	388	35,3
o Jaring Insang Tetap	388	35,3

Sumber : Dinas Perikanan SBB

Tabel diatas menunjukkan jumlah bantuan alat tangkap bagi nelayan di Kecamatan Seram Barat ternyata cukup besar hal ini dapat dilihat untuk pukat pantai 29 unit atau sebesar 1,4%, kemudian untuk puat cincin sebanyak 44 unit atau sebesar 4%, jaring insang hanyut sebesar 251 unit atau sebesar 22,8%, jaring insang lingkar sebanyak 388 unit atau naik sebesar 35,3%, selanjutnya jaring insang tetap sebanyak 338 unit atau sebesar 35,3%.

Bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Seram Barat dari 36 desa di ambil 4 desa sebagai sampel masing-masing desa Luhu, Desa Katapang, Pulau Osi dan Desa Talaga, desa-desa ini mendapat bantuan alat tangkap jaring bobo, katinting, bagan, rumpun dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pada masing-masing desa tersebut seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pendapatan Nelayan
Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Brat
Tahun 2012

Desa	Alat Tangkap	Desa Bantuan (Rp)	Jumlah Pendapatan (per tahun)	Jumlah KK yang mendapat bantuan
Luhu	Jaring Bobo	Rp. 20.000.000	Rp. 265.800.000	20 KK
Ketapang	Bagan	Rp. 5.000.000	Rp. 125.400.000	10 KK
Pulau Osi	Katinting	Rp. 15.000.000	Rp. 122.000.000	10 KK
Talaga	Rompon	Rp. 10.000.000	Rp. 40.800.000	10 KK

Sumber : Hasil Penelitian

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan nelayan dari empat desa yang dijadikan sampel ternyata bervariasi dari jenis alat tangkap dan bantuan dana, dimana bantuan dana tersebut dari jenis alat tangkap dan dari bantuan dana tersebut dapat membantu masyarakat setempat dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan juga

pendapatan dalam keluarga masing-masing desa.

Bertolak dari uraian latar belakang dan data maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat”**.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan sesungguhnya mengandung makna pemberdayaan (*empowerment*). Karena melalui kegiatan pemberdayaan, individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas memperoleh energi dan kekuatan untuk mengembangkan kehidupan lebih baik.

Isbandi Rukmianto Adi (2002 : 31) mengartikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan untuk mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai hidup yang lebih baik. Sedangkan Payne memberikan satu pengertian yang lengkap mengenai pemberdayaan sebagai berikut :

Suatu proses yang ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan, (Isbandi 2001 : 31) dari berbagai pengertian pemberdayaan tersebut, nampaknya konsep ini dianjurkan oleh Payne lebih relevan dan dijadikan landasan dalam penelitian ini, karena pemberdayaan tersebut, nampaknya dimaksudkan dalam kajian ini adalah bagaimana membantu masyarakat agar mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam paradigma baru penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan orang miskin sebagai pelaku utama (Mubyarto 1996 : 16). Namun dalam kenyataannya orang miskin belum berperan secara maksimal memecahkan masalah kemiskinan, karena dihadapi oleh berbagai macam hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu mereka harus diberdayakan atau ditingkatkan

kemampuannya lebih dahulu. Pemberdayaan adalah sebuah aktivitas yang bukan sekedar menyediakan bantuan modal usaha atau perlengkapan fasilitas dan penyediaan pendamping, tetapi suatu aktivitas yang dimulai dengan membangun pribadi manusia secara individu, kelompok dan selanjutnya komunitas secara keseluruhan.

Pemberdayaan masyarakat akan efektif dilakukan apabila proses itu dilaksanakan dibawah satu payung institusi lokal. Sebaliknya pemberdayaan yang dilakukan kepada tiap-tiap orang atau komunitas tanpa suatu organisasi kelompok atau institusi sosial yang mepayunginya diperkirakan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu target yang ingin dicapai dalam misi pemberdayaan adalah dibangunnya institusi lokal yang dilandaskan pada aspirasi masyarakat sendiri.

Agar institusi lokal memainkan peran seperti dikemukakan di atas, maka penguatan (*enforcement*) perlu dilakukan secara teratur, terencana, transparan, transformatif, sistimatis dan berkelanjutan, sehingga institusi lokal itu menjadi kuat atau berdaya dalam arti memiliki sistim pengorganisasian dan manajemen yang baik, pembagian kerja yang transparan serta mampu merumuskan program kerja dan pengalihan tujuan organisasi yang konkrit agar semua anggota komunitas yang terlibat di dalamnya dapat menerima dan bersama-sama berupaya untuk mencapai tujuan tersebut.

2.1.1. Fungsi Pemberdayaan

Menurut Shardlow Pemberdayaan rakyat pada hakikatnya, berfungsi untuk mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang harus dihadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya juga berpendapat bahwa fungsi pemberdayaan adalah untuk memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan

bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.

2.1.2. Model atau Cara Pemberdayaan

a. Secara Umum

Kartasasmita Ginanjar (1995 : 33) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu : (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Asumsinya bahwa kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisir dirinya sendiri, dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan, (2) memperkuat posisi atau daya yang dimilikinya oleh rakyat dengan menerapkan langkah nyata, menampung berbagai masukan menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat paling bawah. (3) memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

b. Secara Khusus

Model pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Karoma Jaya adalah untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya

yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Menyikapi uraian tentang model pemberdayaan rakyat diatas, maka pada hakikatnya kegiatan pemberdayaan adalah merupakan suatu kegiatan praktek pekerjaan sosial yang ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

Praktek pekerjaan sosial adalah suatu proses pemberian pertolongan kepada klien, dengan maksud untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga mereka dapat mengembangkan fungsi sosial dengan baik untuk mencapai suatu standar hidup yang layak sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat.

2.1.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan

Strategi pembangunan yang diterapkan selama Orde Baru adalah strategi yang bertumpu pada produksi, pertumbuhan dan stabilitas pada masa tersebut partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan terabaikan. Masyarakat diperlukan sebagai pihak yang tidak berdaya dan kurang diberikan ruang bagi potensi rakyat untuk berkembang.

Peran pemerintah amat menonjol dalam berbagai hal terutama dalam hal penguasaan sumber daya pembangunan, bersikap potensi dan keputusan yang diambil bersifat *top down*. Pola pendekatan seperti itu menurut Loekman Soetrisno (1955 : 243) mengakibatkan hilangnya kemandirian masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menciptakan kemandirian dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi peran pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah yang selama ini bersikap dominan, regulator clan koptatif menjadi fasilitator yang berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan menentukan arah kebijaksanaan pembangunan saja (Luekman Soetrisno; 1955 : 243).

Pengertian partisipasi menurut konsepsi aparat pemerintah pada dasarnya

berbeda dengan konsepsi yang diajukan oleh para ilmuwan serta pihak praktisi dan pemerhati pembangunan. Partisipasi menurut aparat pemerintah diartikan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas, bukan dari rakyat sendiri (Loekman Soetrisno; 1995 : 237). Defenisi seperti ini lebih bernuansa “mobilisasi” dari pada “keterlibatan”.

Pengertian partisipasi yang sebenarnya seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. Mubyarto (1994 : 74) mengartikan partisipasi sebagai kondisi untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Janobrota Battacharya memandang partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama (Ndraha; 1990 : 102).

Pengertian partisipasi menurut kedua ahli tersebut pada intinya menekankan bahwa keterlibatan seseorang, keluarga, kelompok ataupun komunitas dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan atas kesadaran dan kemauan sendiri serta dilakukan sesuai potensi atau kepastian dan ketrampilan yang dimiliki.

2.1.4. Proses Pemberdayaan

a. Tahap Assesment

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh warga masyarakat. Teknik yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, meliputi : teknik studi pustaka, teknik nominal group process, teknik delphi, curah pendapat dan teknik diskusi kelompok terfokus.

b. Tahap perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Pada tahap ini pelaku perubahan berusaha memfasilitasi warga masyarakat untuk menyusun perencanaan dan menetapkan program-program kerja sebagai agenda yang perlu dilaksanakan.

Penyusunan program hendaknya disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan yaitu melahirkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh baik pada saat sekarang maupun diwaktu mendatang.

c. Tahap Formulasi Rencana Aksi

Kegiatan utama pada tahap ini adalah pihak agen merupakan (*community worker*) membantu, membimbing warga atau kelompok untuk menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan kepada pihak penyandang dana. Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana merumuskan tujuan jangka pendek dan bagaimana mencapai tujuan tertentu.

d. Tahap Pelaksanaan (Implementasi). Program Atau Kegiatan Tahap implementasi rencana merupakan tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat agar pelaksanaan rencana dapat berjalan lancar, maka hal-hal yang mungkin menyebabkan terjadi pertentangan diantara warga supaya dihindari. Disini diperlukan suatu komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mendukung pelaksanaan rencana ini.

e. Bentuk Evaluasi

Kegiatan evaluasi perlu dilakukan pada semua program pengembangan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui suatu tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Kegiatan evaluasi ini dilakukan baik pada tahap input, proses pelaksanaan maupun output dan dampak yang timbul dari pelaksanaan program. Jika hasil evaluasi memberi indikasi terjadi penyimpangan atau tujuan program belum tercapai, maka hasil ini dijadikan tindak lanjut untuk dilakukan revisi terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan peran Brodhead (1987:3) mengemukakan tiga tahap evaluasi pengembangan kegiatan dan pelayanan NGOs sebagai berikut : (1) menyediakan bantuan dan sumbangan, (2) mendanai dan melaksanakan proyek, (3)

menjadi fasilitator atau katalisator. Melihat pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program yang dicapai ke arah pemberdayaan untuk itu konsep evaluasi yang menjadi perhatian utama adalah evaluasi program. Sehingga dengan demikian program pemberdayaan tersebut juga menjadi perhatian sehingga dapat mengetahui dimana titik kelemahan dari program pemberdayaan tersebut, jika ditemukan adanya kegagalan dari program tersebut.

Evaluasi kondisi awal sebagaimana yang dimaksudkan menurut Zastrow adalah suatu evaluasi dari kondisi masyarakat sebelum disentuh oleh suatu program pelayanan. Kondisi awal sebagaimana yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya, kondisi sosial budaya, persepsi sasaran tentang perubahan yang akan dicapai lewat program yang akan dijalankan.

Evaluasi proses adalah suatu bentuk evaluasi terhadap setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam program pelayanan tersebut baik terhadap masalah, metode, strategi, model pendekatan, teknik, alat yang digunakan dan perilaku program dapat memberikan pengaruh bagi perubahan yang diharapkan. sedangkan evaluasi program adalah suatu bentuk evaluasi yang ditujukan kepada program dijalankan dan yang dicapai sebagai akibat dari program pelayanan tersebut.

Dari konteks pemikiran di atas, maka individu atau kelompok mempunyai keinginan untuk kehidupannya diberdaya, jika demikian hal ini dicapai, maka akan mempengaruhi kondisi kesejahteraan sosial yang seluas-luasnya bagi individu atau kelompok tersebut guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Konsep kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada pandangan dari Waiter A. Priedlander (1945 : III) bahwa : Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-

lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesejahteraan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

2.2. Teori Pendapatan

2.2.1. Pengertian Pendapatan

Penghasilan atau pendapatan keluarga adalah segala balas karya yang diproses sebagai imbalan dan atau belas jasa atau sumbangan seseorang terhadap proses (Gilarso 1993 : 63). Sedangkan menurut Budiono 2000 : 64) pendapatan atau *income* dari seseorang warga masyarakat adalah hasil dari penjualannya faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi ini memberi faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar produksi.

Dalam kaitannya dengan defenisi pendapat seseorang maka (Sadono Suhirno 2001 : 49) mengemukakan bahwa pendapatan seseorang adalah sebagai jumlah jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun.

Sedangkan menurut Ace Partandiredja (1992 : 18) berpendapat bahwa “pendapatan adalah bisnis balas jasa yang diperoleh dari faktor-faktor produksi (masukan) yang digunakan dalam produksi barang-barang dan jasa”.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima oleh individu atau pengusaha guna memenuhi kebutuhan hidup merupakan keikutsertaanya dalam mengorbankan tenaga dan pikiran dalam suatu produksi baik barang maupun jasa.

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan masyarakat sebagai berikut :

a. Faktor Sumber Daya Alam (Natural Resources)

Suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengandung nilai ekonomi yang tinggi sehingga memberi dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, sekaligus pemanfaatan alokasi sumber daya alam secara optimal. Hal ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro (1982 : 6) dimana penjualan dari suatu pendapatan individu, pendapatan suatu barang tertentu adalah suatu konsep arus yang dalam prakteknya diukur dengan jalan mencatat dan menjumlahkan transaksi pendapatan individu yang terjadi selama suatu periode waktu tertentu dengan jalan menyewa.

b. Faktor Teknologi (Technology Factor)

Faktor ini juga sangat mempengaruhi pendapatan suatu masyarakat atau negara karena kemajuan teknologi canggih yang sesuai dengan kebutuhan.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (Man Power Factor)

Selain merupakan sumber alam pembangunan, hal ini sangat relavan dengan pendapatan Frederick Herbyson yang dikutip oleh Garduer Ackley (1983 : 84) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor-faktor yang aktif yang bisa mengumpulkan modal, mengesporitasi sumber daya alam, membangun organisasi sosial ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional.

Petani sumber daya manusia mandiri dan trampil akan mempunyai potensi yang lebih baik dibandingkan dengan sumber daya manusia yang kurang mempunyai ketrampilan, untuk itu salah satu faktor yang turut mempunyai peran penting dalam memperoleh pendapat ialah ketrampilan.

2.2.3. Sumber Pendapatan

Secara singkat "income" seorang warga masyarakat ditentukan oleh :

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang bersumber pada :
 - a. Hasil-hasil tabungan di tahun yang lalu
 - b. Warisan atau pemberian
2. Harga perunit masing-masing faktor produksi, harga-harga ini di tentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

Jelas disini bahwa kerja (dari faktor-faktor produksi) bahwa merupakan satu dari dua faktor penting yang menentukan distribusi pendapatan antara warga masyarakat. Faktor lain yaitu pola pemilihan faktor-faktor produksi yang ada merupakan faktor penentu distribusi pendapatan yang sangat penting.

Pendapatan bagi masyarakat adalah merupakan keuntungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk biaya operasional (bahan bakar, alat pancing) upah tenaga kerja dan sebagainya.

Apabila hasil penelitian yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut dapat diperoleh keuntungan. Keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan.

2.3. Teori Biaya

Biaya adalah pengorbanan-pengorbanan yang mutlak harus diandalkan dan harus dikeluarkan agar dapat diperoleh suatu hasil, untuk menghasilkan sesuatu hasil untuk menghasilkan suatu barang dan jasa tertentu ada bahan, tenaga dan jenis pengorbanan lain yang dapat dihadirkan tanpa adanya pengorbanan-pengorbanan tersebut tidak akan diperoleh suatu hasil pengorbanan itu karena dapat diukur dengan nilai uang.

2.4. Hipotesa

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan bahwa hipotesa adalah bantuan pemberdayaan yang dapat berpengaruh signifikan terhadap masyarakat pesisir di Kabupaten Seram Bagian Barat.

III. Metodologi

3.1. Objek atau Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek atau lokasi penelitian adalah Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai daerah yang baru dimekarkan yang baru terlepas dari Kabupaten Maluku Tengah dan masih membutuhkan sarana prasarana infrastruktur guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 4 (empat) kecamatan yang berasal dari sebagian Kabupaten Maluku Tengah (Kabupaten Induk), masing-masing :

- Kec Taniwel (34 Desa)
- Kec Kairatu (29 Desa)
- Kec Seram Barat (12 Desa)
- Kec Hunimual Belakang (14 Desa)

3.2. Penduduk

Adapun jumlah penduduk sebanyak 145.953 jiwa atau 27.495 KK.

- Kec Taniwel : 15.650 jiwa
- Kec Kairatu : 48.850 jiwa
- Kec Seram Barat : 52.575 jiwa
- Kec Hunimual Belakang : 28.878 jiwa

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh dari kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat, sedangkan data sekunder yang bersumber dari Dinas Perikanan yang berlokasi pada Kantor Kabupaten Seram Barat.

3.4. Pengukuran Data

Penelitian ini mengukur dan menggunakan skala rasio.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini sekaligus untuk mengumpulkan data yang akurat maka metode pengumpulan data secara primer dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan alat bantu kuesioner sedangkan pengumpulan data sekunder atau dengan menggunakan dokumen atau catatan sebagai bahan yang diperoleh dari dinas perikanan setempat.

3.6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dalam menganalisis data digunakan analisa Logaritma.

$$\text{Log } y = \beta_0 + \beta_1 \text{ Log } x$$

y = Jumlah Pendapatan

x = Jumlah Bantuan

β_0 = Koefisien Parameter

β_1 = Intersep

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab pendahuluan dimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, untuk itu bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir selama beberapa tahun telah dialokasikan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.

Jumlah Bantuan Alat Pengakapan Ikan di Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Jenis atau alat tangkap	Jumlah (unit)	%
1.	Pukat Pantai	29	1,4
2.	Pukat cincin	44	4,0
3.	Jaring Insang	257	22,8
4.	Hanyut	388	35,3
5.	Jaring Insang	388	35,3
	Lingkar		
	Jaring Insang		
	Tetap		

Sumber : Dinas Perikanan SBB

Dari data diatas dapat dilihat bantuan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir agar masyarakat dapat ikut membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan sehingga dapat mencegah gizi buruk dan dapat meningkatkan status pendidikan anggota keluarga karena dengan semakin membaik pendidikan sangat diharapkan terjadi

perubahan-perubahan yang berguna bagi masyarakat khusus pada desa pesisir.

Dari bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sebagian dana lagi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana alokasi tersebut bervariasi dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Jumlah Pendapatan Yang Diterima Setelah Adanya Bantuan
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di
Kecamatan Seram Bagian Barat
Tahun 2012

Responden	Desa	Jumlah Nilai Bantuan Modal	Pendapatan yang diterima (Kelompok) atau Bulan
1	Seriholo	25.000.000	3.000.000
2	Latu	20.000.000	2.000.000
3	Wailei	15.000.000	1.500.000
4	Tihulale	10.000.000	2.000.000
5	Rumahkay	20.000.000	2.000.000
6	Kamarian	25.000.000	2.500.000
7	Seruawan	20.000.000	2.500.000
8	Waiselang	10.000.000	2.000.000
9	Waitasi	10.000.000	2.000.000
10	Waimital	15.000.000	2.500.000
11	Hatusua	15.000.000	2.500.000
12	Waihatu	20.000.000	2.500.000
13	Nurue	25.000.000	3.000.000
14	Kamal	20.000.000	2.500.000
15	Waesarisa	20.000.000	2.000.000
16	Dokiar	15.000.000	1.500.000
17	Kaibobo	15.000.000	1.500.000
18	Piru	15.000.000	200.000
19	Telaga	15.000.000	2.000.000
20	Kawa	10.000.000	1.500.000
21	Pelita Jaya	15.000.000	2.000.000
22	Pulau Osi	20.000.000	2.500.000
23	Ariate	10.000.000	2.000.000
24	Wael	15.000.000	2.000.000
25	Masika Jaya	20.000.000	2.500.000
26	Lokki	20.000.000	2.500.000
27	Katapang	20.000.000	2.500.000
28	Luhu	15.000.000	1.750.000
29	Iha	20.000.000	1.500.000
30	Kulur	20.000.000	2.000.000
31	Waesela	20.000.000	1.500.000
32	Buano Utara	15.000.000	2.000.000
33	Buano Selatan	15.000.000	1.500.000
34	Tahalupu	20.000.000	2.500.000
35	Nukahai	20.000.000	2.500.000
36	Taniwel	15.000.000	200.000

4.2. Pengaruh Pemberdayaan Bagi Pendapatan Masyarakat Pesisir

4.2.1. Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Pesisir Bagi Desa Luhur Berupa Jaring Bobo

Sesuai hasil olah data dengan menggunakan SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 5,5 + (-71,9222x) \\ Se &= (36,989) \\ r^2 &= 74,7 \\ t\text{-hitung} &= -1,944 \\ t\text{-tabel} &= 2,353 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan data dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya bantuan pemberdayaan jaring bobo bertambah satu unit maka akan mempengaruhi pendapatan akan naik sebesar -71,92% dalam sekali melaut atau dengan kata lain bantuan masih sedikit belum dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Selanjutnya untuk mengukur variabel independen (bantuan jaring bobo) terhadap variabel dependen (pendapatan) dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi (r^2) sebesar 74,7% angka ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan di desa sangat ditentukan oleh alat tangkap sedangkan sisanya 25,3% ditentukan variabel lain yaitu faktor musim, pasar dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengurangi pengaruh variabel (bantuan alat tangkap) terhadap variabel (pendapatan) maka dilakukan dengan cara uji t (t statistik) dimana : Nilai t-hitung = -1,944 dan t-tabel = 2,359

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir berupa jaring bobo berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan apabila nelayan dapat memanfaatkan bantuan-bantuan tersebut dengan baik.

4.2.2. Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Pesisir di Desa Katapang Berupa Bagan

Adapun bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir berupa bagan setelah dianalisa data diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 2,0 + 637 \\ Se &= (577) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= 55,1\% \\ t\text{-hitung} &= 1,143 \\ t\text{-tabel} &= 2,353 \end{aligned}$$

Dari hasil analisa data dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya bentuk pemberdayaan berupa alat tangkap bagan bertambah 1 (satu) unit maka akan mempengaruhi pendapatan akan naik sebesar 637% dalam sekali melaut atau dengan kata lain sesuai dengan peralatan yang dapat diberikan dan dapat menguntungkan pendapatan nelayan.

Selanjutnya untuk mengukur pengaruh variabel independen (bantuan alat tangkap bagan) terhadap variabel pendapatan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 55,1% angka ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan di desa katapang sangat ditentukan oleh alat tangkap bagan sedangkan sisanya 44,9% merupakan variabel-variabel lain yang tidak diukur seperti faktor iklim, pasar dan lain-lain.

Selanjutnya untuk menguji kebenaran hipotesa dimana pengaruh variabel independen (bantuan alat tangkap bagan) terhadap perhitungan pendapatan dilakukan dengan menggunakan uji t (t statistik) dimana t-hitung = 1,143 dan t-tabel = 2,353

Dengan demikian t-hitung < t-tabel dan 1,143 < 2,3533 dengan kata lain alat tangkap bagan kurang berpengaruh bagi pendapatan nelayan atau dengan kata lain alat tangkap ini dikeluarkan untuk menangkap ikan besar masyarakat masih belum mampu menggunakannya artinya peran aktif masyarakat masih rendah sekali.

4.2.3. Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Pulau Osi Berupa Katinting.

Sesuai penelitian dimana pulau osi mendapat bantuan alat tangkap katinting dan setelah dianalisa dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 6,5 + 1,48 \\ Se &= (0,13) \\ r^2 &= 56,0\% \\ t\text{-hitung} &= 1,170 \\ t\text{-tabel} &= 2,353 \end{aligned}$$

Dari hasil analisa data dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya

bantuan pemberdayaan berupa katinting bertambah satu unit maka akan mempengaruhi pendapatan nelayan naik sebesar 1,48% atau dengan kata lain bantuan katinting sangat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

Selanjutnya untuk mengukur variabel independen (alat tangkap katinting) terhadap variabel dependen (pendapatan) dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi (r^2) sebesar 56% angka ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan sangat ditentukan bantuan peralatan berupa katinting sedangkan nelayan sangat ditentukan bantuan peralatan berupa katinting sedangkan sisanya 44% ditentukan oleh variabel lain yaitu musim cuaca pasar, dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengakui pengaruh variabel independen (bantuan alat tangkap katinting) terhadap variabel dependen (pendapatan) maka pengujian dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji t (t statistik) dimana : t-hitung = 1,170 dan t-tabel = 2,353 dengan demikian t-hitung > t-tabel (1,110 < 2,353) artinya bantuan pemberdayaan berupa alat tangkap katinting berpengaruh terhadap signifikan bagi peningkatan pendapatan.

4.2.4. Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Talaga Berupa Rompon

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan mengenai beberapa nilai nominal bantuan pemberdayaan masyarakat serta tingkat pendapatan masyarakat pesisir sesuai dengan metode analisis dengan menggunakan analisa logaritma dan setelah data diolah secara statistik dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= -11,3 + 16,695x \\ Se &= (5,925) \\ r^2 &= 85,2\% \\ t\text{-hitung} &= 2,818 \\ t\text{-tabel} &= 3,353 \end{aligned}$$

Dari hasil analisa data dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya bantuan pemberdayaan berupa rompon masyarakat pesisir bertambah 1 unit alat tangkap maka akan mempengaruhi pendapatan nelayan akan naik 16,65% atau nelayan dalam sekali melaut atau dengan kata

lain sesuai dengan peralatan yang diberikan tidak terlalu besar sehingga jarak melaut pun terbatas sekaligus mempengaruhi pendapatan nelayan.

Selanjutnya untuk mengukur variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat dilihat hasil koefisien determinasi (r^2) sebesar 85,2% angka ini menunjukkan bahwa 85,2% pendapatan nelayan sangat ditentukan oleh bantuan alat tangkap dan sisanya 30,8% ditentukan oleh variabel yaitu faktor pendidikan potensi pasar.

Selanjutnya untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t (t statistik) dimana. t-hitung > t-tabel atau 2,818 > 2,353

Dengan demikian bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima.

4.3. Analisa Kualitatif

Berdasarkan hasil perhitungan secara kuantitatif dan hasil pengamatan secara langsung ternyata masih terdapat banyak kendala sehingga diperlukan solusi sebagai berikut :

- a. Diharapkan untuk waktu-waktu mendatang pemerintah dalam memberikan bantuan pemberdayaan perlu melakukan pendampingan dan tidak hanya pada saat bantuan diberikan namun diharapkan adanya monitoring atau pengawasan sampai dengan nelayan dapat mandiri.
- b. Sesuai hasil pengamatan terhadap hasil tangkapan pada waktu-waktu tertentu terjadi *over produksi* sehingga untuk mengatasi pemerintah daerah terutama Dinas Perikanan sudah harus dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian agar ikan dapat diolah menjadi abon ikan, ikan asin sehingga tidak hanya dipasarkan pada pasar lokal namun dapat dipasarkan keluar. Dari bantuan tersebut berpengaruh signifikan bagi pengangkutan pendapatan masyarakat 36 desa dan dusun di pilih 4 desa yang dijadikan sampel.

Tabel 4.3.

Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Terhadap

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir
Kecamatan Seram Bagan Barat
(Sebelum di Logaritma)

I. Desa Luhu (Jaring Bobo)

Tahun	Jumlah Bantuan (X)	Jumlah Pendapatan (Y)
2008	Rp. 12.000.000	Rp. 256.710.000
2009	Rp. 12.000.000	Rp. 258.565.000
2010	Rp. 15.000.000	Rp. 260.260.000
2011	Rp. 20.000.000	Rp. 261.075.000
2012	Rp. 20.000.000	Rp. 265.800.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Pendapatan

II. Desa Katapang

Tahun	Jumlah Bantuan (X)	Jumlah Pendapatan (Y)
2008	Rp. 3.000.000	Rp. 112.800.000
2009	Rp. 3.000.000	Rp. 113.550.000
2010	Rp. 4.000.000	Rp. 115.710.000
2011	Rp. 4.000.000	Rp. 119.265.000
2012	Rp. 5.000.000	Rp. 125.400.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Pendapatan

III. Pulau Osi (Katinting)

Tahun	Jumlah Bantuan (X)	Jumlah Pendapatan (Y)
2008	Rp. 12.000.000	Rp. 93.445.000
2009	Rp. 12.000.000	Rp. 115.164.000
2010	Rp. 12.000.000	Rp. 177.300.000
2011	Rp. 15.000.000	Rp. 118.386.000
2012	Rp. 15.000.000	Rp. 122.400.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Pendapatan

IV. Desa Ketepang (Rompon)

Tahun	Jumlah Bantuan (X)	Jumlah Pendapatan (Y)
2008	Rp. 5.000.000	Rp. 34.175.000
2009	Rp. 5.000.000	Rp. 34.225.000
2010	Rp. 8.000.000	Rp. 39.280.000
2011	Rp. 10.000.000	Rp. 40.125.000
2012	Rp. 10.000.000	Rp. 40.800.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Pendapatan

Tabel 4.4

Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Terhadap
Peningkatan Masyarakat Pesisir Kecamatan
Seram Barat

(Sesudah di Logaritma)

I. Desa Luhu (Jaring Bobo)

Tahun	Jumlah Bantuan (log)	Jumlah Pendapatan (log)
2008	Rp. 70.791.812,46	Rp. 84.094.427,87
2009	Rp. 70.791.812,46	Rp. 84.125.697,37
2010	Rp. 71.760.912,59	Rp. 84.154.074,25
2011	Rp. 73.010.299,96	Rp. 84.167.652,87
2012	Rp. 73.010.299,96	Rp. 84.245.549,77

Sumber : Dinas Perikanan dan Pendapatan

II. Desa Katapang (Bagam)

Tahun	Jumlah Bantuan (log)	Jumlah Pendapatan (log)
2008	Rp. 64.771.212,55	Rp. 80.523.019
2009	Rp. 64.771.212,55	Rp. 80.551.871
2010	Rp. 66.020.599,91	Rp. 80.633.708,94
2011	Rp. 66.020.599,91	Rp. 80.765.130,13
2012	Rp. 66.989.700,04	Rp. 80.982.975,36

Sumber : Dinas Perikanan dan Pendapatan

III. Pulau Osi (Katinting)

Tahun	Jumlah Bantuan (Log)	Jumlah Pendapatan (Log)
2008	Rp. 70.791.812,46	Rp. 79.725.560,68
2009	Rp. 70.791.812,46	Rp. 80.613.167,41
2010	Rp. 70.791.812,46	Rp. 80.692.980,12
2011	Rp. 71.760.912,59	Rp. 80.733.003,47
2012	Rp. 71.760.912,59	Rp. 80.877.814,16

Sumber : Dinas Perikanan dan Pendapatan

IV. Desa Katapang (Rompon)

Tahun	Jumlah Bantuan (Log)	Jumlah Pendapatan (Log)
2008	Rp. 66.989.700,04	Rp. 75.337.085,23
2009	Rp. 66.989.700,04	Rp. 75.343.434,57
2010	Rp. 69.030.899,87	Rp. 75.941.714,79
2011	Rp. 70.000.000	Rp. 76.034.150,45
2012	Rp. 70.000.000	Rp. 76.106.601,63

Sumber : Dinas Perikanan dan Pendapatan

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka kesimpulan dan saran yang dapat ditarik oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

1. Seram Bagian Barat merupakan yang Kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan berpotensi. Dan berdasarkan data dapat diketahui bahwa masyarakat pesisir di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat sangat membutuhkan pemberdayaan bagi pendapatan mereka.
2. Pendapatan adalah balas jasa yang di peroleh dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam produksi barang-barang dan jasa sehingga dapat dilihat bahwa bantuan pemberdayaan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan pada masyarakat pesisir untuk itu bantuan pemberdayaan diupayakan dapat menolong dan memacu peningkatan

pendapatan, oleh karena itu peran aktif masyarakat dan memacu peningkatan pendapatan, oleh karena itu peran aktif masyarakat pesisir di Kecamatan Seram Barat sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi serta dunia usaha lapangan kerja.

3. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan desa yang dijadikan sampel dan mendapat bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu Desa Luhu, Ketapang, Pulau Osi, Talaga. Untuk desa Luhu diperoleh persamaan sebagai berikut $Y = 6,5 + 4,8x$ artinya, dengan adanya bantuan sebesar 0,1% akan mempengaruhi peningkatan sebesar 1,4% sedangkan untuk mengetahui pengaruh bantuan pemberdayaan berupa jaring bobo terhadap peningkatan sebesar 56%.
4. Untuk desa Katapang diperoleh persamaan sebagai berikut :
 $Y = -71922 + 5,5x$ artinya apabila bantuan pemberdayaan berupa bagan ikan sebesar 1% maka terjadi peningkatan pendapatan sebesar 5,5%, sedangkan untuk mengetahui berapa besar bantuan terhadap pendapatan sesuai dengan nilai $r^2 = 74,4$ artinya bantuan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan.
5. Untuk Pulau Osi diperoleh persamaan sebagai berikut :
 $Y = 2,0 + 0,637x$ artinya dengan adanya bantuan pemberdayaan berupa katinting sebesar 1% maka mempengaruhi pendapatan sebesar 0,63%, sedangkan untuk mengetahui pengaruh bantuan terhadap pendapatan dilihat dari nilai $r^2 = 55,1$ artinya bantuan alat tangkap tersebut akan mempengaruhi peningkatan pendapatan sebesar 55,1%.
6. Untuk Desa Talaga diperoleh persamaan sebagai berikut :
 $Y = -1,3 + 116,69x$ artinya dengan adanya bantuan pemberdayaan berupa rompon sebesar 1% maka akan mempengaruhi peningkatan sebesar 116,69% sedangkan untuk mempengaruhi pengaruh bantuan pemberdayaan terhadap pendapat dilihat dari $r^2 = 85,2\%$ artinya bantuan tersebut berpengaruh pada pendapatan sebesar 85,2%.

5.2. Saran

Setelah dikemukakan beberapa kesimpulan maka penulis merasa perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diamati dari nilai bantuan proyek pemberdayaan yang diterima para nelayan perlu adanya pengawasan selain itu pula proyek-proyek bantuan masyarakat pesisir boleh dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan karena tidak adanya pengawasan, monitoring sampai dengan adanya nelayan itu dapat mandiri.
2. Diamati dari potensi daerah setempat yang masih terbatas maka pemerintah setempat terutama Dinas Perikanan sudah harus dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian sehingga hasil tangkapan ikan dapat diolah kembali menjadi ikan asapan, abon ikan, sehingga menjangkau pasar diluar.
3. Selain alat tangkap yang masih terbatas berdasarkan latar pendidikan masyarakat setempat maka sangat dibutuhkan adanya pelatihan, penyuluhan bagi pengelolaan sumber daya alam.
4. Diamati dari hasil penelitian dan hasil analisa data maka dapat diasumsikan bahwa bantuan pemberdayaa cukup baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dengan bantuan-bantuan pemberdayaan tersebut.

PUSTAKA

1. Ace Partadiredja, 1992 *Perhitungan Pendapatan Nasional*, Yogyakarta, lembaga pengkajian Pengabdian, fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta
2. Arie Sudarman, 1992, *Teori Ekonomi Mikro*, Jilid III, Penerbit Badan Penelitian Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta
3. Bambang, 2006, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi UGM
4. Kartasmita Ginanjar, 1985, *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tunjangan Administrasi*, Buletin Alumni SESPA, Edisi keempat

5. Loekman Soetrisno, 1955, *Tingkat Partisipasi Masyarakat*, Penerbit Lembaga Penelitian Pengakjian Pengabdian, Jakarta
6. Michael P Todaro, 1988, *pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Penerbit Ghalia Indonesia
7. Mubyarto, 1989, *Pengertian Ekonomi pertanian*, Penerbit fakultas Ekonomi 41 Jakarta
8. Sadono Sukirno, 2001, *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta
9. Shardlow, 2000, Diterjemahkan Thaya Supriatna, *Strategi Pembangunan Kemiskinan*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Pertama
10. Waiter A. Priedlander, 1945, *The Practice of Sosial Work*. Brooks Cole Publishing Compaby, Pasific Grofe california